



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Watampone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis yang telah ditetapkan (2015 – 2019) dan progres report pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

Berikut ini merupakan pencapaian target kinerja setiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali);
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2019 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	97,29 %	108,1 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	1 %	72,2 %	7.220 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
- Banding	90 %	99,61 %	110,68 %
- Kasasi	71 %	99,97 %	140,8 %
- PK	99 %	100 %	101,01 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	83	83,55	100,66 %
Rata-Rata Capaian Sasaran I Tahun 2019 :			1.125,89 %

Tabel 3.2

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,66 %	99,66 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90,5 %	100,6%	91 %	90,26%	99,19 %	90 %	90,35%	100,39%	90 %	95,67 %	106,3 %	90 %	97,29 %	108,1 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	-	-	-	-	10 %	11,82 %	118,2 %	10 %	(6,13) %	(61,3) %	1 %	72,2 %	7.220 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :															
- Banding	90%	99,2%	110,2%	95 %	98,92%	104,13%	90 %	99,37%	110,41%	90 %	99,5 %	110,56 %	90 %	99,31 %	110,34 %
- Kasasi	95%	72,7%	76,6%	95 %	50 %	52,63 %	95 %	75 %	78,95 %	90 %	71,43 %	79,37 %	71 %	99,97 %	140,8 %
- PK	97%	100%	103,1%	99 %	100 %	101,01%	99 %	99,92 %	100,93 %	99 %	99,98 %	100,99%	99 %	100 %	101,01 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	-	-	-	-	-	-	85	86,83	102,15%	87	83,52	96 %	83	83,55	100,66 %

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	99,66 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90,5 %	90,26 %	90,35 %	93,62 %	97,29 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	11,82 %	(6,13) %	72,2 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
- Banding	99,2 %	98,92 %	99,37 %	99,5 %	99,31 %
- Kasasi	72,7 %	50 %	75 %	71,43 %	99,97 %
- PK	100 %	100 %	99,92 %	99,98 %	100 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	-	-	86,83	83,52	83,55

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2018 di tahun 2019.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2018 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 277 perkara.

Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2018

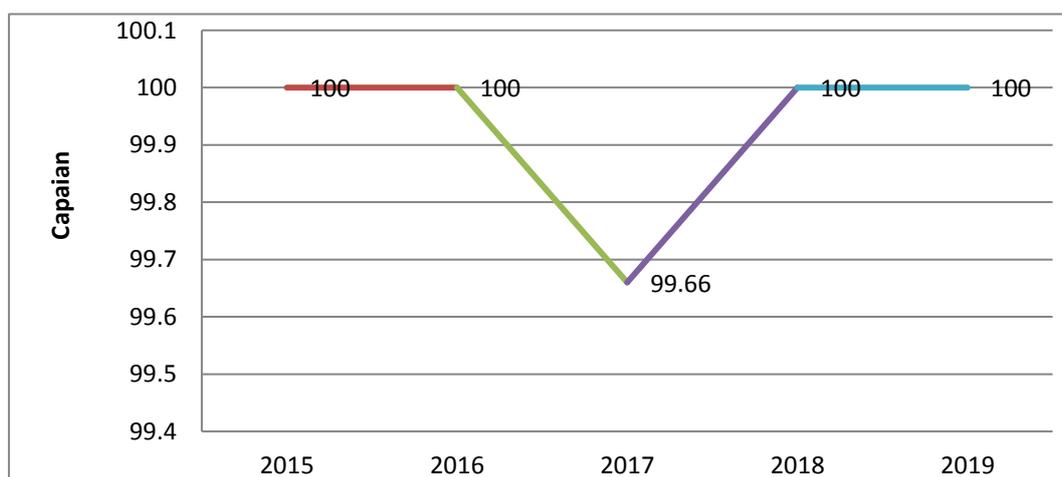
NO.	BULAN	PERKARA DISELESAIKAN	SISA PERKARA
1	Januari	140	137
2	Februari	66	71

3	Maret	43	28
4	April	17	11
5	Mei	10	1
6	Juni	0	1
7	Juli	0	1
8	Agustus	1	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	Nopember	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		277	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 277 sisa perkara tahun 2018, semuanya berhasil terselesaikan pada tahun 2019, sehingga realisasi 100 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua sisa perkara tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2019.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2015 dan 2016 berturut-turut memperoleh capaian sebesar 100 %, target tercapai. Tetapi pada tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai. Pada tahun 2018 capaiannya meningkat menjadi 100 %, begitu pula pada tahun 2019.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian sisa perkara ini adalah :
- a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
 - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
 - c) Skala prioritas untuk penanganan sisa tunggakan perkara untuk tahun yang lalu.
 - d) Sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone, terutama kontrol dari Ketua Majelis Hakim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

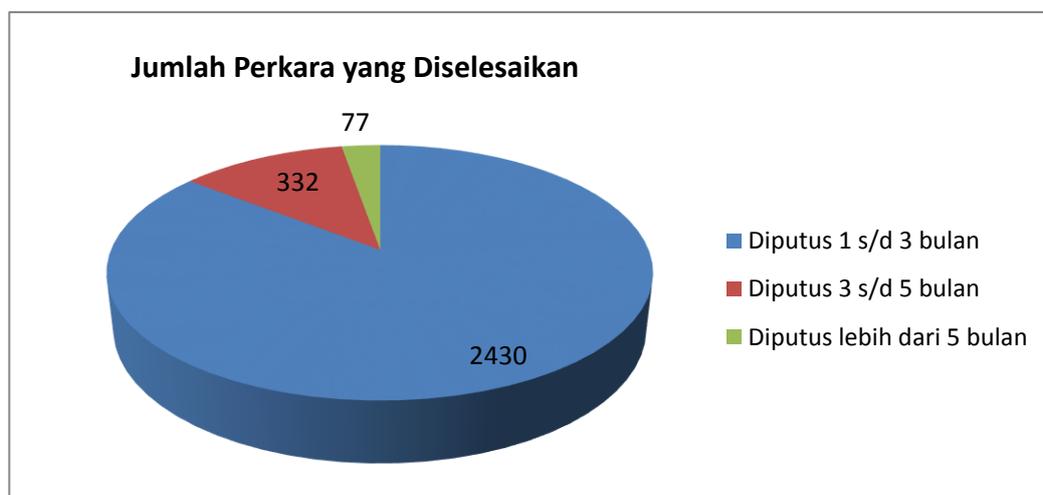
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 ditargetkan 90 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.5
Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun 2019

No	Bulan	Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan
1	Januari	116	36	16

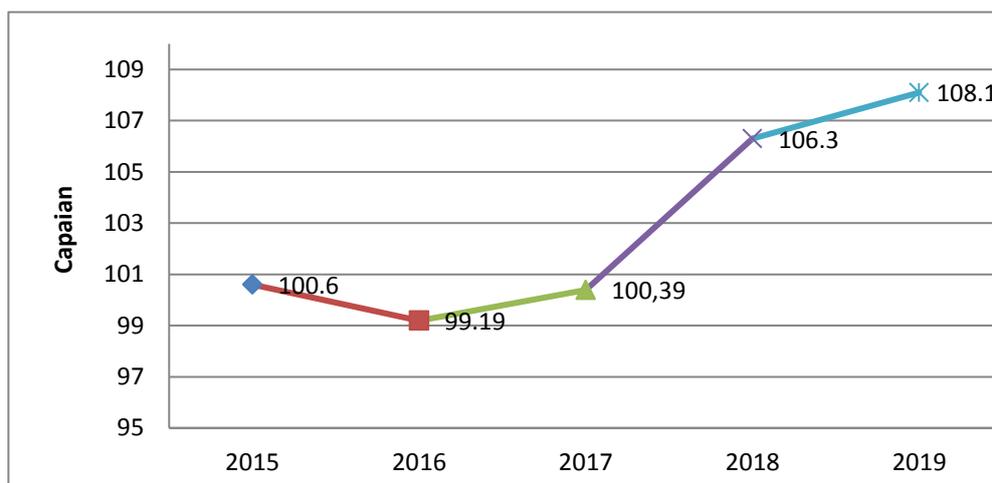
2	Februari	159	44	5
3	Maret	143	27	16
4	April	284	19	4
5	Mei	122	32	10
6	Juni	156	22	13
7	Juli	190	22	0
8	Agustus	277	26	2
9	September	384	22	0
10	Oktober	193	24	6
11	Nopember	214	35	2
12	Desember	192	23	3
	Jumlah	2.430	332	77
	Tepat Waktu	2.762		
	Total	2.839		

Berdasarkan tabel di atas, dari 2.839 perkara yang diselesaikan, terdapat 2.762 perkara yang tepat waktu, sehingga realisasi 97,29 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 90 %, sedangkan realisasi sampai dengan 97,29 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 7,29 %, dari target 90 % sedangkan realisasinya 97,29 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 108,1 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2015, capaian indikator kinerja sebesar 100,6 %, target tercapai. Namun pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 99,19 %. Sedangkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 capaiannya meningkat.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3 realisasi indikator kinerja tahun 2019 adalah 97,29 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 90,2 %, maka realisasi indikator kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :
 - a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
 - b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
 - c) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup.
 - d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan perkara dari pimpinan.

SASARAN I

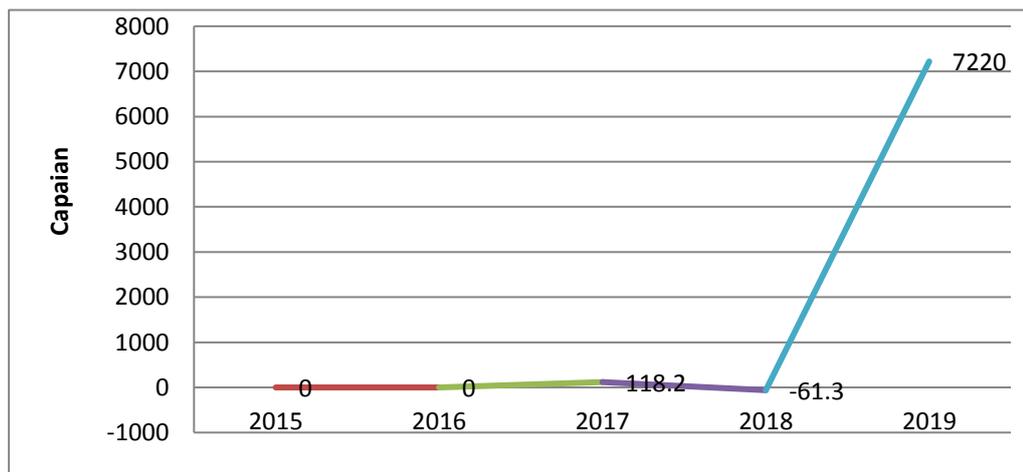
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2019 ditargetkan 1 % dari jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2018). Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 77 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 277 perkara sehingga realisasi 72,2 %. Jadi pencapaiannya adalah 7.220 %, melebihi target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 1 %, sedangkan realisasi 72,2 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 71,2 %, dari target 1 % sedangkan realisasinya 72,2 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 7.220 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, capaian indikator kinerja meningkat sebesar 118,2 %, melebihi target. Namun pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi (61,3) %, tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2019, capaiannya meningkat menjadi 7.220 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 7.220 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 7 %, maka realisasi indikator kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

- a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.
- b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara.
- c) Adanya dukungan terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang digunakan tenaga teknis fungsional dalam penyelesaian perkara.
- d) Menurunnya jumlah perkara ghaib yang diterima di akhir tahun.
- e) Berkurangnya jumlah perkara yang pihaknya berstatus PNS karena wajib memperoleh izin cerai dari atasan, sementara pemberian izin diperketat.
- f) Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat Teknologi Informasi yang cukup memadai.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

❖ **Banding**

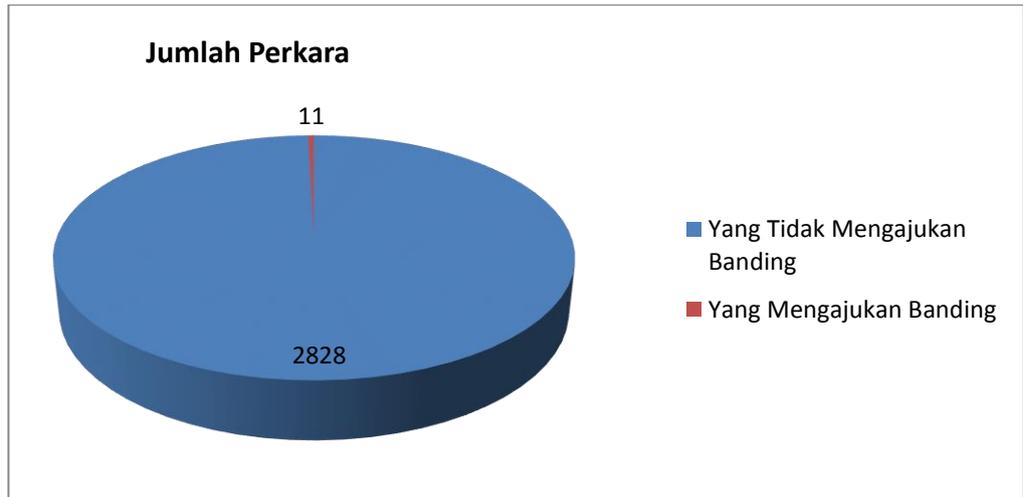
Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 ditargetkan 90 % dari jumlah putusan perkara.

Tabel 3.6
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	77/Pdt.G/2018/PA.Wtp.	25 April 2019	Cabut, 9 Mei 2019
2	343/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	2 September 2019	Cabut, 6 September 2019
3	621/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	10 September 2019	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama
4	433/Pdt.G/2019/PA.Wtp	11 September 2019	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama
5	307/Pdt.G/2019/PA.Wtp	16 Oktober 2019	Dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
6	337/Pdt.G/2019/PA.Wtp	21 Oktober 2019	Dalam Proses Tingkat Banding
7	843/Pdt.G/2019/PA.Wtp	30 Oktober 2019	Dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
8	525/Pdt.G/2019/PA.Wtp	7 Nopember 2019	Dalam Proses Tingkat Banding
9	974/Pdt.G/2019/PA.Wtp	14 Nopember 2019	Cabut
10	1013/Pdt.G/2019/PA.Wtp	26 Nopember 2019	Dalam Proses Tingkat Pertama
11	583/Pdt.G/2019/PA.Wtp	9 Desember 2019	Dalam Proses Tingkat Pertama

Tabel 3.7
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2019

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	37	131
2	Februari	38	170
3	Maret	29	157
4	April	194	113
5	Mei	46	118
6	Juni	92	99
7	Juli	98	114
8	Agustus	183	122
9	September	281	125
10	Oktober	63	160
11	Nopember	102	149
12	Desember	82	136
	Total	1.245	1.594



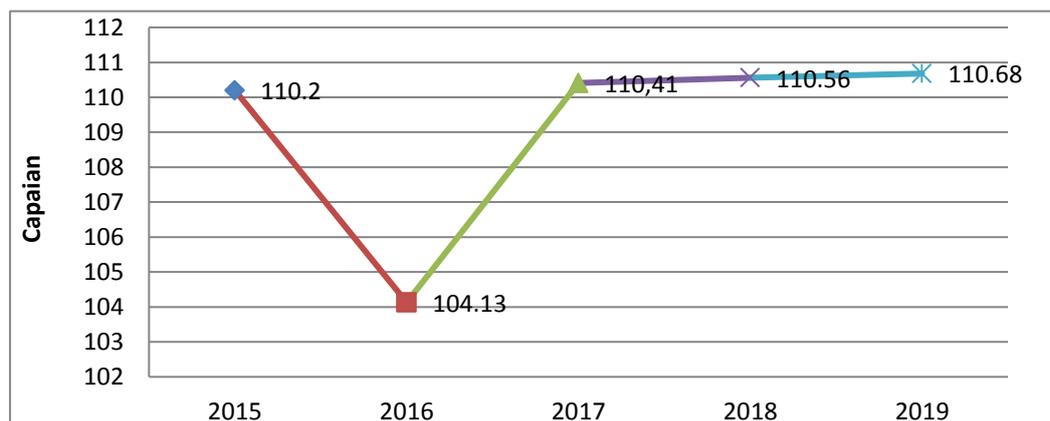
Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum banding adalah 11 perkara, dari 2.839 perkara yang diputus, sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

$$((2.839 - 11) / 2.839) \times 100 \% = 99,61 \%$$

Jadi pencapaiannya : $(99,61 / 90) \times 100 \% = 110,68 \%$. Dengan demikian, capaian kinerja melebihi target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 90 %, sedangkan realisasi sampai dengan 99,61 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 9,61 %, dari target 90 % sedangkan realisasinya 99,61 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 110,68 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2015, indikator kinerja memperoleh capaian 110,2 %, melebihi target. Namun pada tahun 2016 capaiannya mengalami penurunan menjadi 104,13 %, karena target dinaikkan menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 capaiannya kembali meningkat menjadi 110,41 %, 110,56 % dan 110,68 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 99,61 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 91 %, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2019 ditargetkan 71 % dari jumlah perkara yang diputus / diselesaikan.

Tabel 3.8
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

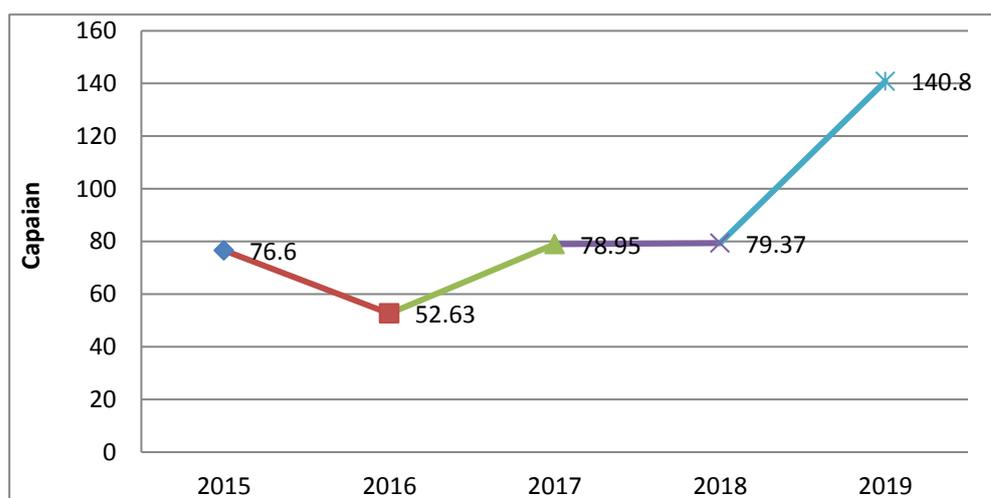
No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	137/Pdt.G/2018/PA.Wtp.	13 Mei 2019	Dalam Proses Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1 perkara, dari 2.839 perkara yang diputus. Hal tersebut berarti 2.838 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga realisasi 99,97 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 71 %, sedangkan realisasi 99,97 %.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 28,97 %, dari target 71 % sedangkan realisasinya 99,97 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 140,8 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2015, indikator kinerja memperoleh capaian 76,6 %, tidak mencapai target. Pada tahun 2016, capaiannya menurun menjadi 52,63 %. Namun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, capaiannya terus meningkat.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 99,97 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 89,2 %, maka realisasi kinerja melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding meningkat.

❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 3.1, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2019 ditargetkan 99 % dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan).

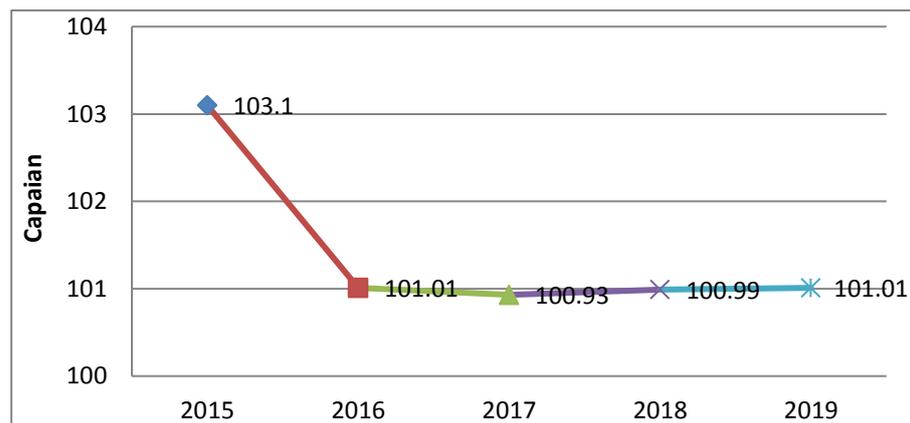
Tabel 3.9
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	NIHIL	

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 dari 2.839 putusan perkara, sehingga realisasi 100 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 99 %, sedangkan realisasi sampai dengan 100 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1 %, dari target 99 % sedangkan realisasinya 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,01 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2015 indikator kinerja memperoleh capaian 103,1 %, melebihi target. Namun pada tahun 2016 dan 2017, capaian berturut – turut menurun menjadi 101,01 % dan 100,93 %. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019, capaian kembali meningkat menjadi 100,99 % dan 101,01 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 101,01%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98,6 %, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

SASARAN I
Indikator Kinerja ke-5 : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 83.

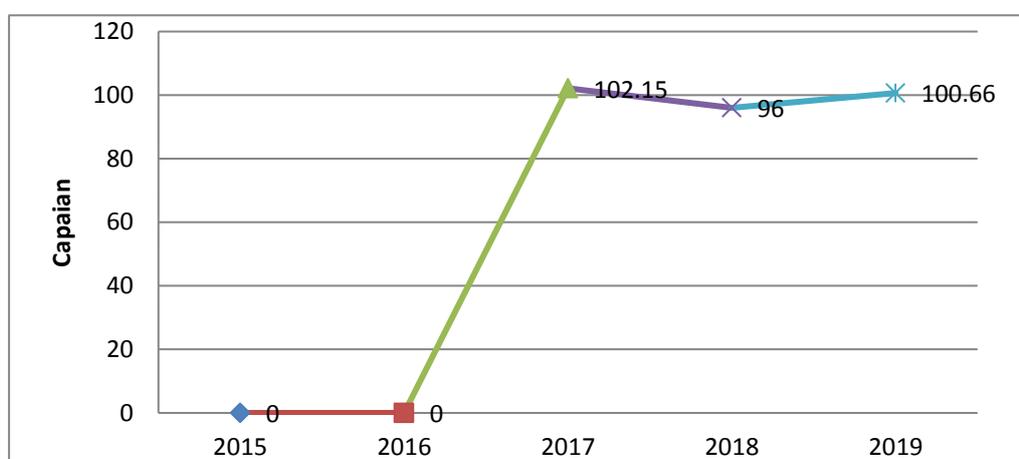
Tabel 3.10
 Nilai Rata – Rata Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,34	B
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,32	B
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	3,32	B
4	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	3,33	B
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,32	B
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,34	B
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,32	B
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,46	B
9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,34	B
Rata-rata tertimbang		3,34	B

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 dari 351 responden. Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 83,55.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu target 83 %, sedangkan realisasi 83,55 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 0,55 %, dari target 83 % sedangkan realisasinya 83,55 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,66 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2017 meningkat sebesar 102,15 %. Namun pada tahun 2018, capaiannya menurun menjadi 96 %. Tetapi pada tahun 2019, capaiannya meningkat menjadi 100,66 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 83,55. Realisasi tersebut hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2018 karena survey yang dilakukan pada tahun 2017 belum menggunakan metode sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Demikian halnya dengan tahun 2014, 2015 dan 2016 yang sama sekali belum dilakukan survey kepuasan layanan pengadilan.

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 adalah 83,52. Dengan demikian, realisasi pada tahun 2019 mencapai target dan merupakan capaian yang baik menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017. Untuk

lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,54 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

5. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 83,55 sudah masuk kategori yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :
- Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunakan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.
 - Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan survey di tahun 2019.
 - Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisisioner cukup tinggi sehingga memungkinkan pengisian kuisisioner yang cukup akurat.
 - Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi tingkat akurasi data survey.
 - Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari keadilan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	59,49 %	59,49 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	1 %	2,91 %	291 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	92 %	71,43 %	77,64 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %	N.A	N.A
Rata-Rata Capaian Sasaran II Tahun 2019 :			142,71 %

Tabel 3.12

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	-	-	100%	58,36%	58,36%	100%	56,65%	56,65 %	100 %	59,05 %	59,05 %	100 %	59,49 %	59,49 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	-	-	3 %	1,58 %	52,49%	1 %	0,58%	58%	1 %	2,60 %	260 %	1 %	2,91 %	291 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	-	-	-	100%	62,5 %	62,5 %	100%	73,33%	73,33 %	100 %	92,86 %	92,86 %	92 %	71,43 %	77,64 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	-	-	-	-	1 %	N.A	N.A	1 %	N.A	N.A	100 %	N.A	N.A

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	58,36%	56,65 %	59,05 %	59,49 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	-	1,58 %	0,58%	2,60 %	2,91 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	-	62,5 %	73,33%	92,86 %	71,43 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	N.A	N.A	N.A

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

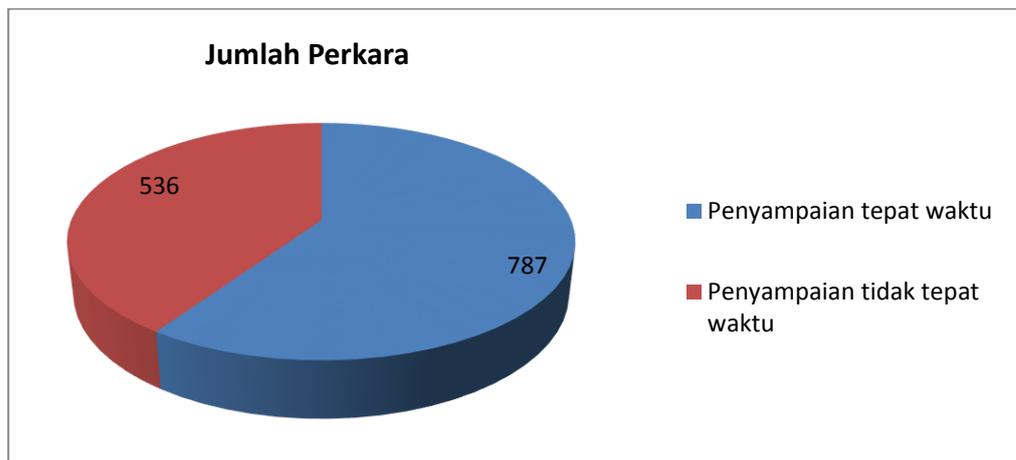
Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Tabel 3.14
Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus	
		Verstek	Diluar Hadirnya
1	Januari	95	8
2	Februari	130	7
3	Maret	119	7
4	April	86	4
5	Mei	88	2
6	Juni	85	5
7	Juli	101	0
8	Agustus	107	6
9	September	97	7

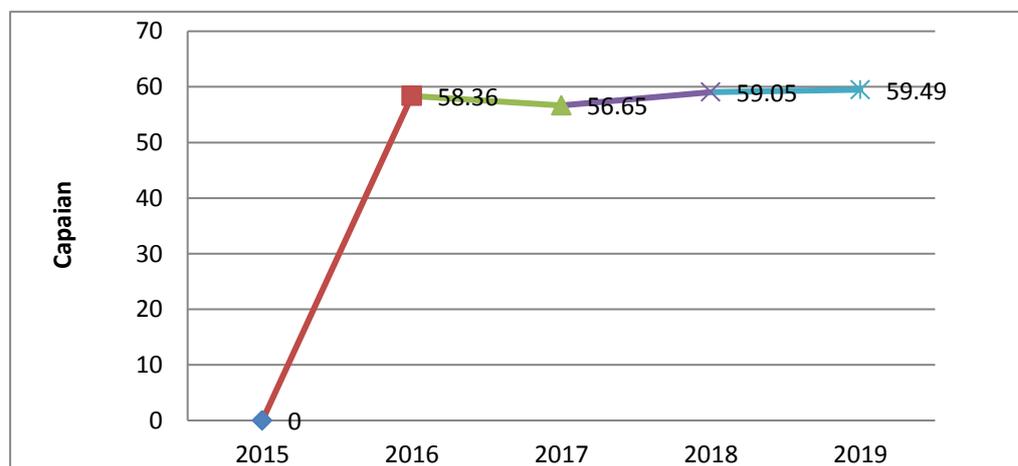
10	Oktober	128	3
11	Nopember	119	7
12	Desember	104	8
Jumlah		1.259	64
Total		1.323	

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.323 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 536 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 59,49 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 100 %, namun realisasi hanya 59,49 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 40,51 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 59,49 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 59,49 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian sebesar 58,36 %, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, capaiannya menurun menjadi 56,65 %. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 capaiannya berturut-turut meningkat menjadi 59,05 % dan 59,49 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2019 adalah 59,49 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :
 - a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.
 - b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (5 orang) dengan jumlah perkara yang dikelola (2.916 perkara) tidak seimbang.
 - c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27 kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondisi wilayah yang sulit terjangkau.
 - d) Proses penyerahan berkas perkara Banding kepada pengelola belum maksimal sehingga pemberitahuan inzage kepada para pihak terlambat dilakukan.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 ditargetkan 1 % dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Tabel 3.15
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	16	-	9	7
2	Februari	21	-	16	12
3	Maret	13	-	20	5
4	April	16	2	16	3
5	Mei	14	2	12	3
6	Juni	10	-	9	4
7	Juli	21	-	16	9
8	Agustus	11	-	15	5
9	September	10	-	8	7
10	Oktober	21	1	18	9
11	Nopember	16	-	18	7
12	Desember	10	-	10	7
Jumlah		179	5	167	

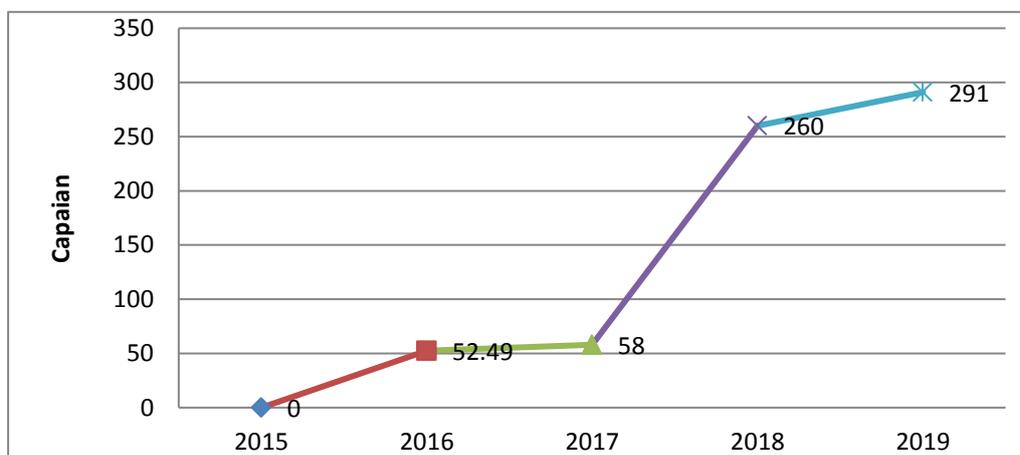
Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2019 sebanyak 179 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 5 perkara, sedangkan 7 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 2,91 %.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target 1 %, sedangkan realisasi sampai dengan 2,91 % .
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 1,91 %, dari target 1 % sedangkan realisasinya 2,91 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 291 %.

- Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2016, indikator kinerja memperoleh capaian 52,49 %, target tidak tercapai. Namun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, capaiannya meningkat berturut-turut menjadi 58 %, 260 % dan 291 %.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 adalah 2,91 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 1,5%, maka realisasi kinerja melebihi target.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan Hakim Mediator sudah maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara dalam menyelesaikan perkara secara damai.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

pada tahun 2019 ditargetkan 92 % dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum.

Tabel 3.16
Pengiriman Berkas Perkara Banding

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar		Ket.
			Nomor Surat	Tanggal Surat	
1	77/Pdt.G/2018/PA.Wtp	25-04-2019	-	-	Cabut
2	343/Pdt.G/2019/PA.Wtp	02-09-2019	-	-	Cabut
3	621/Pdt.G/2019/PA.Wtp	10-09-2019	W20-A2/1970/ Hk.05/X/2019	10-10-2019	Putus
4	433/Pdt.G/2019/PA.Wtp	11-09-2019	W20-A2/1972/ Hk.05/X/2019	11-10-2019	Putus
5	307/Pdt.G/2019/PA.Wtp	16-10-2019	W20-A2/2171/ Hk.05/XI/2019	13-11-2019	Putus
6	337/Pdt.G/2019/PA.Wtp	21-10-2019	W20-A2/2209/ Hk.05/XI/2019	22-11-2019	
7	843/Pdt.G/2019/PA.Wtp	30-10-2019	W20-A2/2235/ Hk.05/XI/2019	27-11-2019	
8	525/Pdt.G/2019/PA.Wtp	7-11-2019	W20-A2/2278/ Hk.05/XII/2019	5-12-2019	
9	974/Pdt.G/2019/PA.Wtp	14-11-2019	-	-	Cabut
10	1013/Pdt.G/2019/PA.Wtp	26-11-2019	W20-A2/2318/ Hk.05/XII/2019	26-12-2019	
11	583/Pdt.G/2019/PA.Wtp	9-12-2019	-	-	Dalam proses Tk. Pertama

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 11 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, terdapat 3 perkara yang dicabut serta 1 perkara (berwarna biru) yang masih dalam proses dan belum cukup 30 hari sejak terdaftar, sehingga pengukuran hanya dapat dilakukan terhadap 7 perkara.

Berdasarkan tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Banding, terdapat 4 perkara (berwarna kuning) yang berkasnya melebihi 30 hari sejak pendaftaran. Jadi yang dapat dibandingkan adalah 3 perkara yang berkasnya dikirim secara benar dan tepat waktu terhadap 7 perkara yang telah dikirim berkasnya, sehingga realisasinya 42,86 %.



Tabel 3.17
Pengiriman Berkas Perkara Kasasi

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	137/Pdt.G/2018/PA.Wtp.	13 Mei 2019	W20-A2/954/Hk.05/VI/2019	11 Juni 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa tanggal surat pengantar pengiriman berkas perkara Kasasi tidak melebihi 60 hari sejak pendaftaran dan dikirim secara lengkap, sehingga realisasi 100 %.

Tabel 3.18
Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Surat Pengantar	
			Nomor Surat	Tanggal Surat
1	NIHIL	-	-	-

Selama tahun 2019, tidak ada perkara Peninjauan Kembali yang terdaftar sehingga tidak ada berkas perkara yang dikirim. Oleh karena itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut.

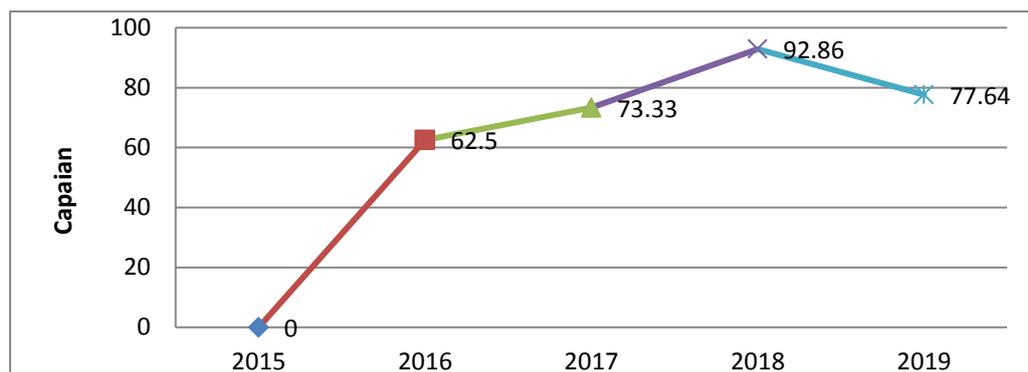
Realisasi rata-rata indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding dan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (42,86 \% + 100 \%) / 2 \\ &= 71,43 \% . \end{aligned}$$

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 92 %, namun realisasi hanya 71,43 %.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih kurang yaitu sebesar 20,57 %, dari target 92 % sedangkan realisasinya 71,43 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 77,64 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.12 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, capaian kinerja dari tahun 2016 sampai 2018 terus meningkat meski target belum tercapai. Namun pada tahun 2019, capaiannya menurun menjadi 77,64 %.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.13 di atas.

Pada tabel 3.13, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 71,43 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 98 %, maka realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut :
 - a) Minutasi perkara yang dimohonkan Banding belum maksimal sehingga pemberitahuan inzage kepada para pihak tidak dapat terlaksana lebih awal (paling lama 14 hari setelah perkara Banding diterima).
 - b) Keterbatasan jumlah Jusrita / Jusrita Pengganti jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.
 - c) Koordinasi diantara pengelola berkas perkara Banding belum maksimal.

SASARAN II
Indikator Kinerja ke-4 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2019 ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara. Selama tahun 2019, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama Watampone. Begitu pula dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator berikut ini :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2019 pada sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %

c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III :			100 %

Tabel 3.20

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan															
Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.21
Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis III					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					
Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	100 %	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	-	-	100 %	100 %	100 %
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	100 %	100 %	100 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun anggaran 2019 terdapat anggaran sebesar Rp 23.460.000,- (*Dua puluh tiga juta*

empat ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan target 60 perkara.

Tabel 3.22
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo Tahun 2019

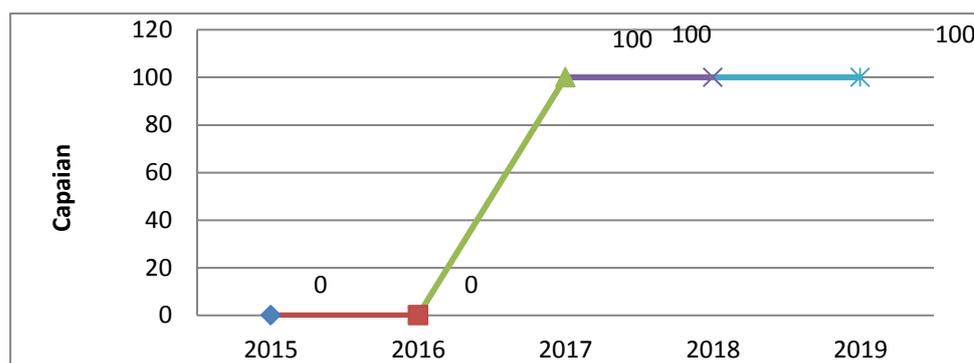
BULAN	No.		Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Rincian Anggaran			Ket
	Urut	LPBP			Panjar	Anggaran	Pagu	
			Saldo Awal					23.460.000
MARET	1	1	194/P/2019	25/03/2019		306.000	23.154.000	16/04/2019
	2	2	195/P/2019	25/03/2019		306.000	22.848.000	06/05/2019
	3	3	196/P/2019	25/03/2019		306.000	22.542.000	24/04/2019
	4	4	197/P/2019	25/03/2019		256.000	22.286.000	22/04/2019
	5	5	428/G/2019	25/03/2019		281.000	22.005.000	25/04/2019
	6	6	429/G/2019	25/03/2019		296.000	21.709.000	08/04/2019
	7	7	430/G/2019	25/03/2019		291.000	21.418.000	10/04/2019
APRIL	1	8	301/P/2019	15/04/2019		181.000	21.237.000	08/05/2019
	2	9	302/P/2019	15/04/2019		216.000	21.021.000	14/05/2019
	3	10	495/G/2019	15/04/2019		281.000	20.740.000	07/05/2019
	Tambah biaya 428/G/2019			25/04/2019		75.000	20.665.000	
MEI	Tambah biaya 495/G/2019			07/05/2019		75.000	20.590.000	
	1	11	320/P/2019	07/05/2019		216.000	20.374.000	28/05/2019
	2	12	321/P/2019	07/05/2019		316.000	20.058.000	10/06/2019
	3	13	322/P/2019	07/05/2019		206.000	19.852.000	13/06/2019
	4	14	323/P/2019	07/05/2019		206.000	19.646.000	27/05/2019
JUNI	1	15	718/G/2019	19/06/2019		291.000	19.355.000	24/10/2019
	2	16	719/G/2019	19/06/2019		291.000	19.064.000	29/10/2019
JULI	1	17	510/P/2019	09/07/2019	916.000	131.000	18.933.000	05/08/2019
	2	18	511/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	18.802.000	05/08/2019
	3	19	512/P/2019	09/07/2019	1.516.000	131.000	18.671.000	05/08/2019
	4	20	513/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	18.540.000	05/08/2019
	5	21	514/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	18.409.000	05/08/2019
	6	22	515/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	18.278.000	05/08/2019
	7	23	516/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	18.147.000	05/08/2019
	8	24	517/P/2019	09/07/2019	916.000	131.000	18.016.000	05/08/2019
	9	25	518/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	17.885.000	05/08/2019
	10	26	519/P/2019	09/07/2019	886.000	131.000	17.754.000	05/08/2019
	11	27	520/P/2019	09/07/2019	916.000	131.000	17.623.000	05/08/2019
	12	28	521/P/2019	10/07/2019	916.000	131.000	17.492.000	05/08/2019
	13	29	522/P/2019	11/07/2019	886.000	131.000	17.361.000	05/08/2019
	14	30	523/P/2019	12/07/2019	916.000	131.000	17.230.000	05/08/2019
	15	31	524/P/2019	13/07/2019	886.000	131.000	17.099.000	05/08/2019
	16	32	525/P/2019	14/07/2019	916.000	131.000	16.968.000	05/08/2019
	17	33	526/P/2019	15/07/2019	886.000	131.000	16.837.000	05/08/2019
AGUSTUS	1	34	945/G/2019	15/08/2019	696.000	296.000	16.541.000	05/09/2019
	2	35	946/G/2019	15/08/2019	661.000	281.000	16.260.000	03/09/2019

	3	36	947/G/2019	15/08/2019	696.000	296.000	15.964.000	03/09/2019
	4	37	699/P/2019	15/08/2019	916.000	316.000	15.648.000	10/09/2019
	5	38	700/P/2019	15/08/2019	886.000	306.000	15.342.000	10/09/2019
	6	39	701/P/2019	15/08/2019	886.000	306.000	15.036.000	09/09/2019
	7	40	707/P/2019	16/08/2019			15.036.000	09/09/2019
	67	100	767/P/2019	16/08/2019		7.991.000	7.045.000	11/09/2019
	68	101	783/P/2019	19/08/2019			7.045.000	17/09/2019
	91	124	806/P/2019	19/08/2019		3.144.000	3.901.000	17/09/2019
SEPTEMBER	Tambah biaya 946/G/2019			03/09/2019		75.000	3.826.000	
	Tambah biaya 945/G/2019			05/09/2019		80.000	3.746.000	
	1	125	1075/G/2019	16/09/2019		446.000	3.300.000	17/10/2019
	2	126	1076/G/2019	16/09/2019		546.000	2.754.000	16/10/2019
	3	127	1077/G/2019	16/09/2019		441.000	2.313.000	01/10/2019
	4	128	1078/G/2019	16/09/2019		281.000	2.032.000	10/10/2019
	5	129	1079/G/2019	16/09/2019		681.000	1.351.000	30/09/2019
	6	130	1136/G/2019	25/09/2019		296.000	1.055.000	29/10/2019
	7	131	1137/G/2019	25/09/2019		296.000	759.000	16/10/2019
	8	132	1012/P/2019	25/09/2019		416.000	343.000	23/10/2019
OKTOBER	1	133	1031/P/2019	07/10/2019		216.000	127.000	30/10/2019
	2	134	1177/G/2019	07/10/2019		127.000	0	21/10/2019
					Realisasi:	23.460.000		
					Sisa :	0		

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2019 sebanyak 134 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 23.460.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100 %. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja mencapai target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara prodeo tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2019.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

- Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Majelis Hakim.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / *zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan

dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk 14 kegiatan. Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

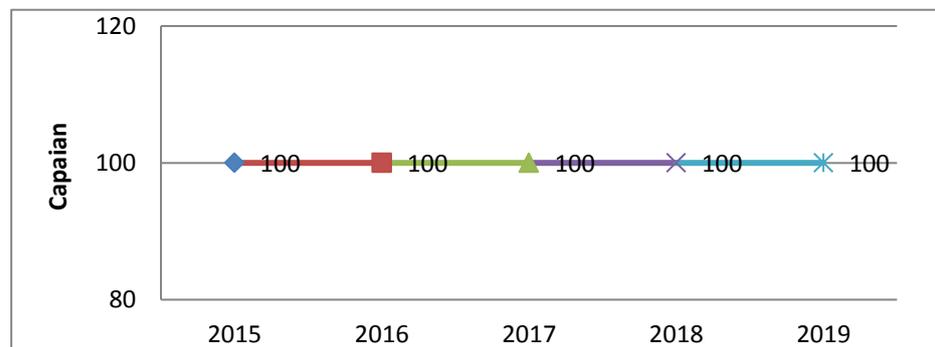
Tabel 3.23
Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Barebbo	2	22	1 -2 April 2019	Rp. 4.300.000
2	Cina	2	20	30 April 2019 dan 2 Mei 2019	Rp. 4.300.000
3	Bengo	2	18	25 Mei 2019 dan 26 Juni 2019	Rp. 4.300.000
4	Amali	2	12	22 Juli 2019 dan 25 Juli 2019	Rp. 4.300.000
5	Awangpone	2	27	5 Agustus 2019 dan 7 Agustus 2019	Rp. 4.300.000
6	Bontocani	2	16	13 Agustus 2019 dan 15 Agustus 2019	Rp. 4.300.000
7	Salomekko	2	20	9 – 10 September 2019	Rp. 4.200.000
	Total	14	135		Rp. 30.000.000

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar Gedung yang dilaksanakan selama tahun 2019 sebanyak 14 kegiatan, menyidangkan 135 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 30.000.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar Gedung sehingga realisasi 100%, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar Gedung.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, capaian kinerja tetap 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
 - a) Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang keliling.
 - b) Kualitas Sumber Daya Manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
 - c) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*)
Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang

mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Sidang Pelayanan Terpadu yang diselenggarakan pada tahun 2019 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Sidang Pelayanan Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.500.000,- (*lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada tahun 2019 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara *Voluntair* identitas hukum yang diajukan.

Tabel 3.24
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

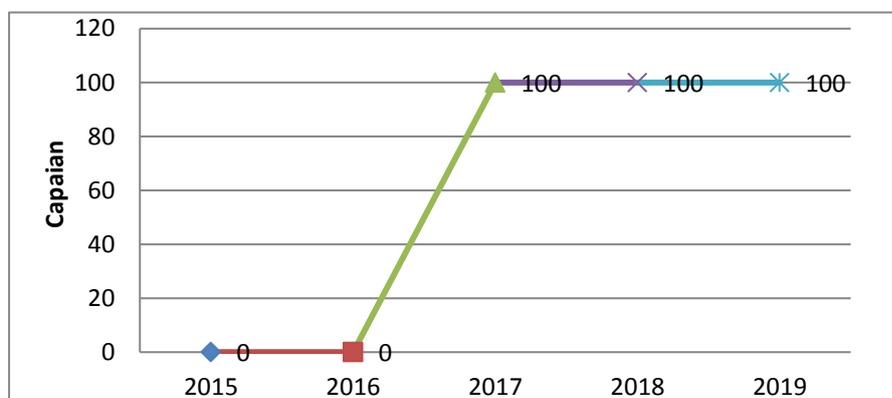
No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Perkara Disidangkan	Tanggal Pelaksanaan	Serapan Anggaran
1	Barebbo	1	70	4 April 2019	Rp. 6.320.000
2	Cina	1	61	29 April 2019	Rp. 6.320.000
3	Bengo	1	60	27 Juni 2019	Rp. 6.320.000
4	Amali	1	41	23 Juli 2019	Rp. 6.320.000
5	Awangpone	1	51	8 Agustus 2019	Rp. 6.320.000
6	Bontocani	1	53	14 Agustus 2019	Rp. 6.320.000
7	Salomekko	1	51	11 September 2019	Rp. 6.290.000
8	Ulaweng	1	84	17 September 2019	Rp. 6.290.000
	Total	8	471		Rp. 50.500.000

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 471 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.500.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan berhasil diselesaikan.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisasi kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :
- Terjalin kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan sidang Pelayanan Terpadu.
 - Kualitas Sumber Daya Manusia dan fasilitas di lokasi sidang memadai.
 - Kebutuhan masyarakat akan Buku Nikah sangat tinggi.

SASARAN III
Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pada DIPA 04 tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 64.000.000,- (*enam puluh empat juta rupiah*) dengan target 640 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.19, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 ditargetkan 100 % terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.25
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

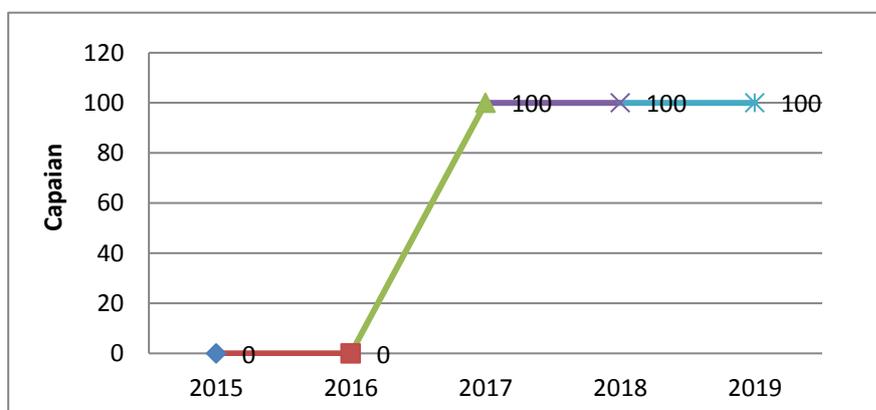
No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	64	Terbayar pada bulan April 2019	123
4	April	64	Rp. 6.400.000,-	153
5	Mei	64	Rp. 6.400.000,-	99
6	Juni	64	Rp. 6.400.000,-	109
7	Juli	64	Rp. 6.400.000,-	160
8	Agustus	64	Rp. 6.400.000,-	119
9	September	64	Rp. 6.400.000,-	183
10	Oktober	64	Rp. 6.400.000,-	162
11	Nopember	64	Rp. 6.400.000,-	163
12	Desember	64	Rp. 12.800.000,-	64
	Jumlah	640	Rp. 64.000.000,-	1.335

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2019 sebanyak 1.335 perkara dalam waktu 640 jam layanan dengan serapan anggaran sebesar Rp 64.000.000,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2019

sebanyak 1.335 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama, yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.20 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisasi indikator kinerja mencapai target.

5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2019 pada Sasaran IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	62 %	62,5 %	100,81 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV :			100,81 %

Tabel 3.27

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
	Target	Realisasi	Capaian												
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	57,1%	76,2%	100%	66,67%	66,67%	100%	66,67%	66,67%	100 %	62,5 %	62,5 %	62 %	62,5 %	100,81 %

Tabel 3.28

Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	57,1 %	66,67%	66,67%	62,5 %	62,5 %

Berdasarkan tabel 3.26, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 ditargetkan 62 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Tabel 3.29
Data Eksekusi

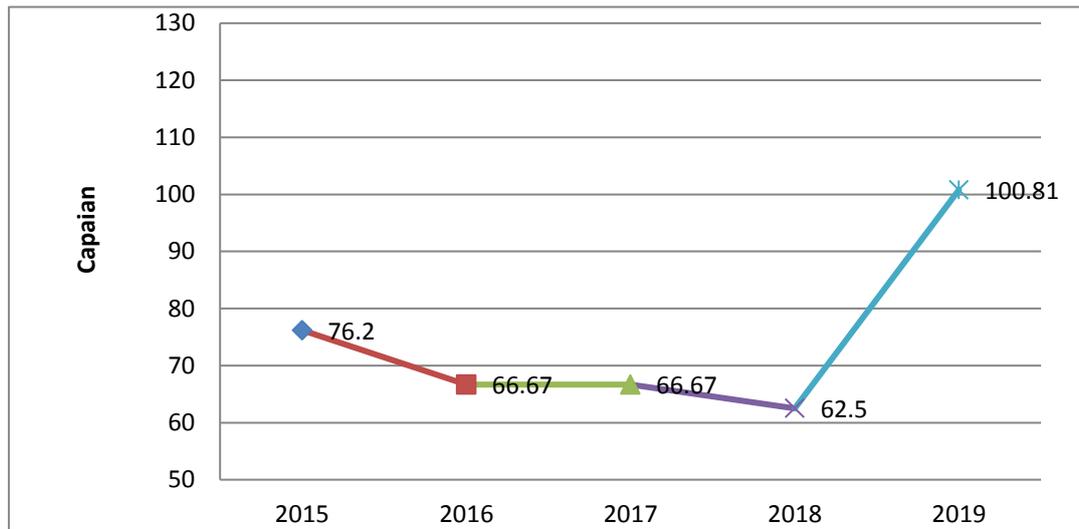
Uraian	Jumlah
Sisa tahun lalu	4
Permohonan eksekusi yang diterima	5
Eksekusi yang dilaksanakan	5
Eksekusi yang dicabut	1
Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi	-
Sisa yang belum dieksekusi (dalam proses)	3

Berdasarkan tabel di atas, dari 9 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2019, terdapat 5 perkara yang dilaksanakan, 1 perkara yang dicabut dan 3 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 62,5 %, target tercapai.



1. Pencapaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu target 62 %, sedangkan realisasi 62,5 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini terpaut selisih lebih yaitu sebesar 0,5 %, dari target 62 % sedangkan realisasinya 62,5 %. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,81 %.
3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.27 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2015 memperoleh capaian 76,2 %. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2016 menurun menjadi 66,67 %. Pada tahun 2017 capaian indikator tetap 66,67 %. Namun pada tahun 2018 capaian menurun menjadi 62,5 %, target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2019, capaian mengalami kenaikan menjadi 100,81 %, melebihi target.

- Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel 3.28 di atas.

Pada tabel 3.28, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 adalah 62,5 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 87,4 %, maka realisasi kinerja belum mencapai target.

- Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian adalah karena adanya dukungan berupa kerjasama yang baik dari pihak Kepolisian Polres Bone dan itikad baik dari pihak Termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2019 tanggal 05 Desember 2018 sejumlah **Rp 12.775.837.000,-** (*dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Namun setelah revisi penambahan anggaran dari BA.BUN berupa Langganan Internet, pengadaan Laptop SIPP Hakim 4 unit, bantuan Rumah Sewa Dinas Hakim dan Belanja Gaji Pokok PNS, anggaran menjadi **Rp 13.424.184.000,-** (*tiga belas milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2019 tanggal 05 Desember 2018 sejumlah **Rp 167.960.000,-** (*seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar **Rp 13.592.144.000,-** (*tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2019 dari anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka ada tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja modal.

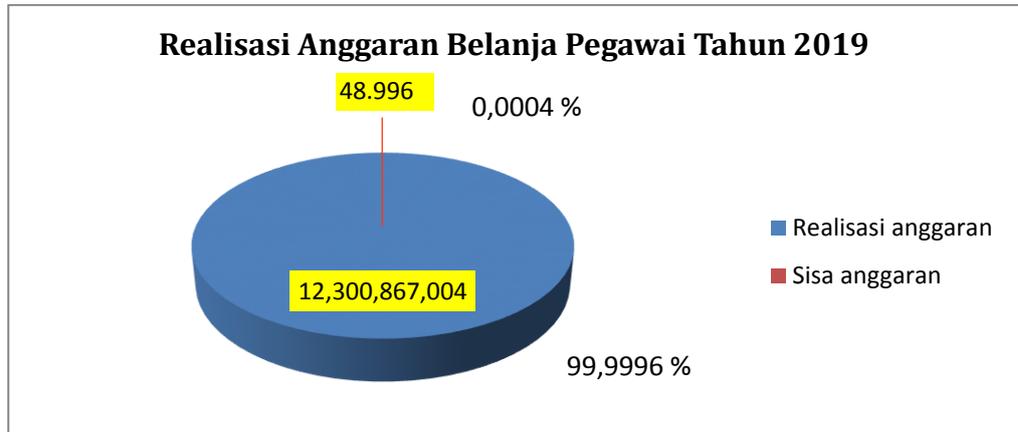
Realisasi anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.300.916.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 12.300.867.004,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 48.996,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0004 %

Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai antara Tahun 2019 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

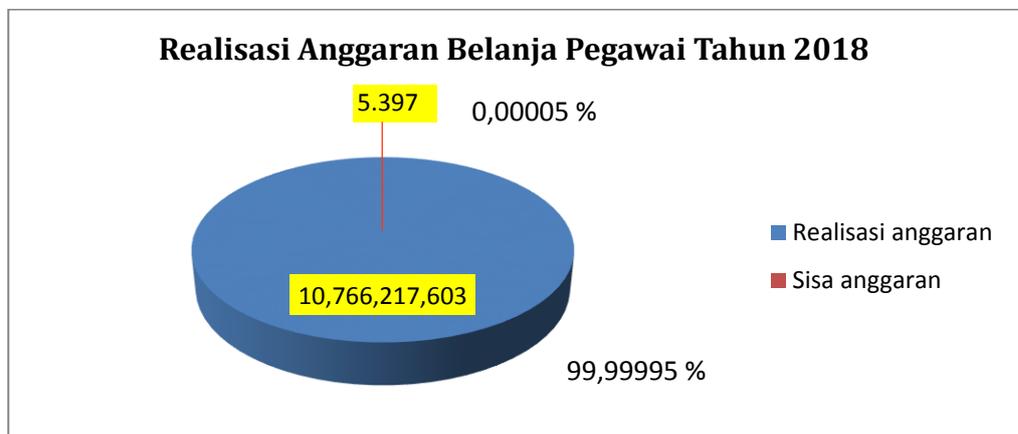
a) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.766.223.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 10.766.217.603,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 5.397,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,99995 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,00005 %

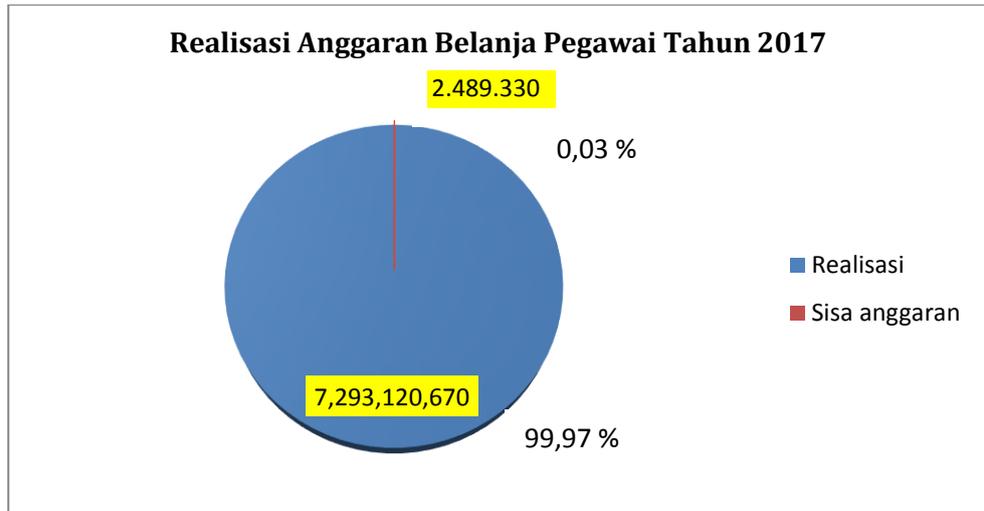
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



c) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 7.295.610.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 7.293.120.670,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 2.489.330,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %

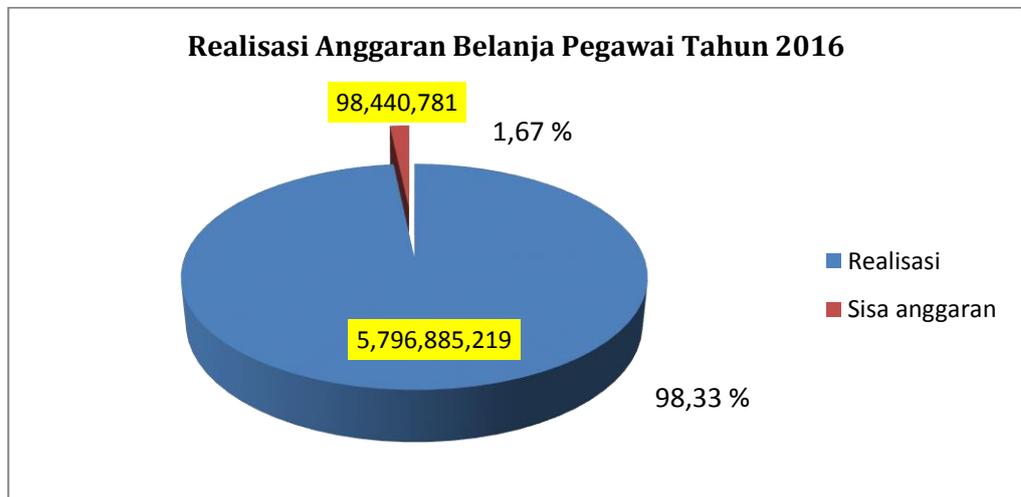
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



d) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 5.895.326.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 5.796.885.219,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 98.440.781,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 98,33 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 1,67 %

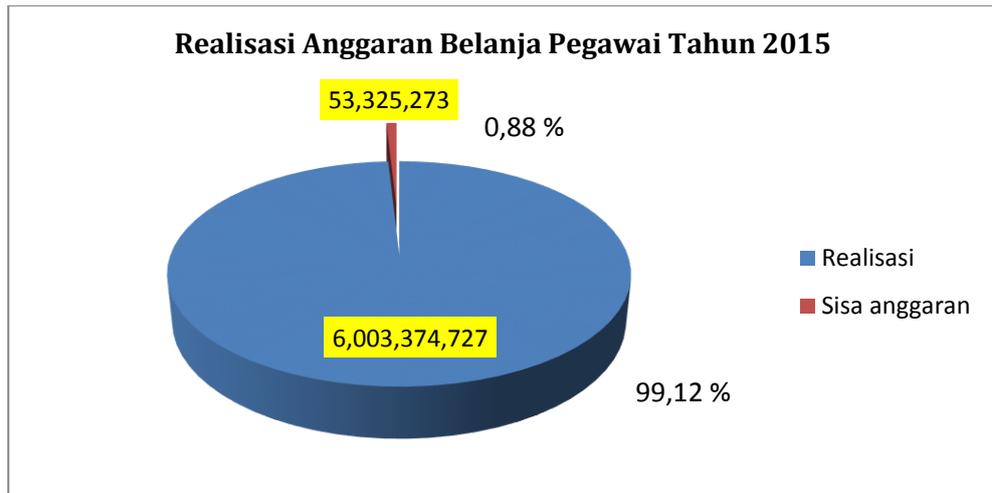
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



e) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 6.056.700.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 6.003.374.727,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 53.325.273,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,12 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,88 %

Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar **0,79 %** dibandingkan dengan tahun 2015. Namun pada tahun 2017, penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar **1,64 %**. Begitu pula pada tahun 2018 penyerapan anggaran mengalami kenaikan tipis senilai **0,0295 %**, bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Namun pada tahun 2019, penyerapan menurun sebesar **0,00035 %**. Pagu anggaran 2019, 2018 dan 2017 tersebut merupakan hasil revisi belanja pegawai untuk mengatasi pagu minus.

2. Belanja Barang

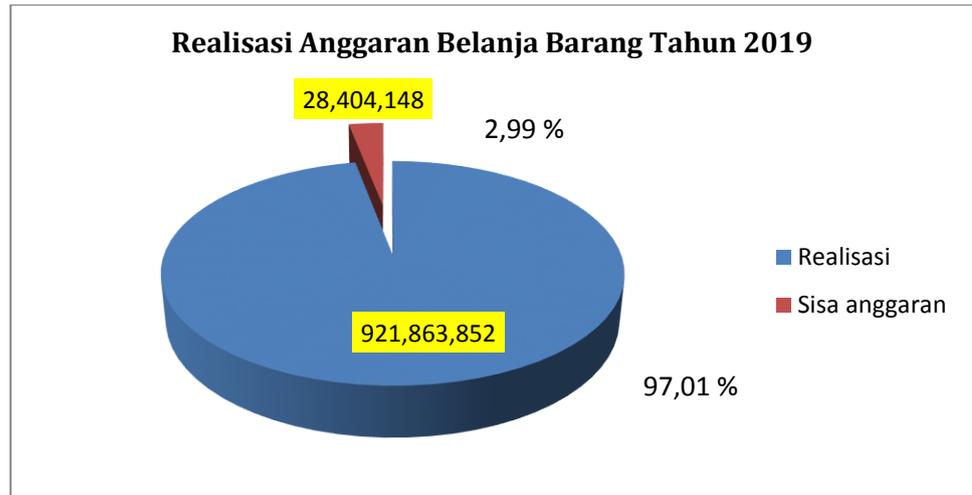
a). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2019 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrarasi MA-RI adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 950.268.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 921.863.852,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 28.404.148,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,01 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,99 %

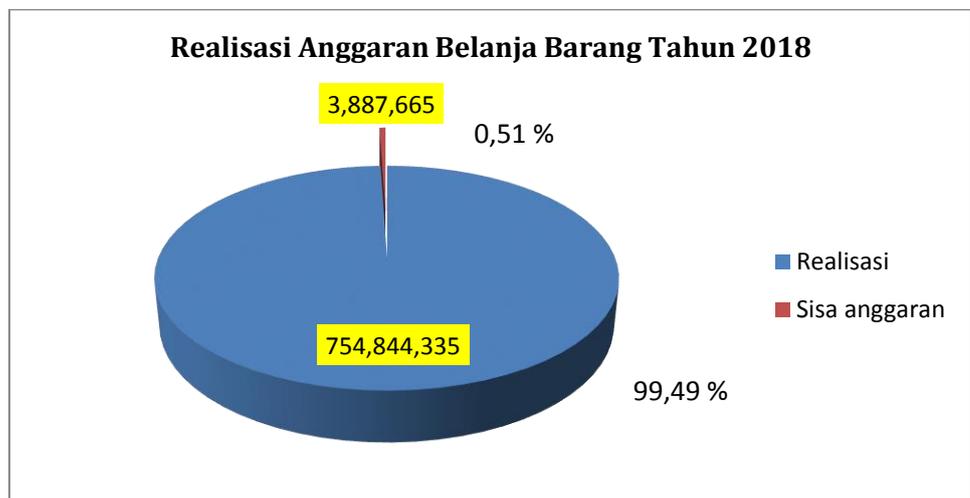
Kalau dibandingkan dengan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara Tahun 2019 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



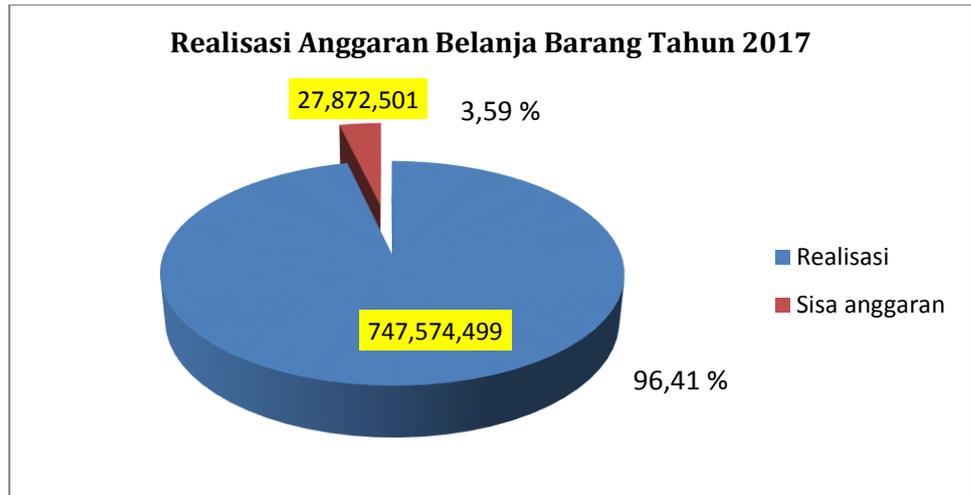
2) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2018 :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 758.732.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 754.844.335,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 3.887.665,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,49 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,51 %



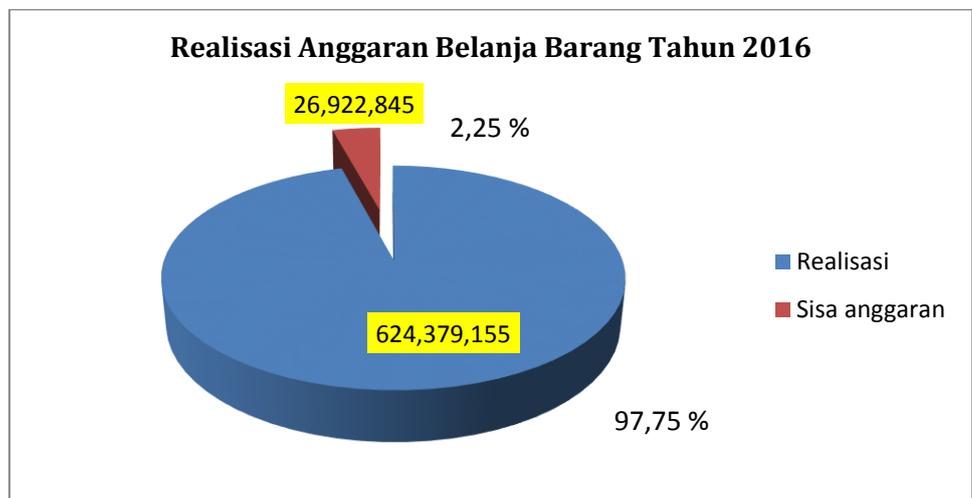
3) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 775.447.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 747.574.499,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 27.872.501,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 96,41 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 3,59 %



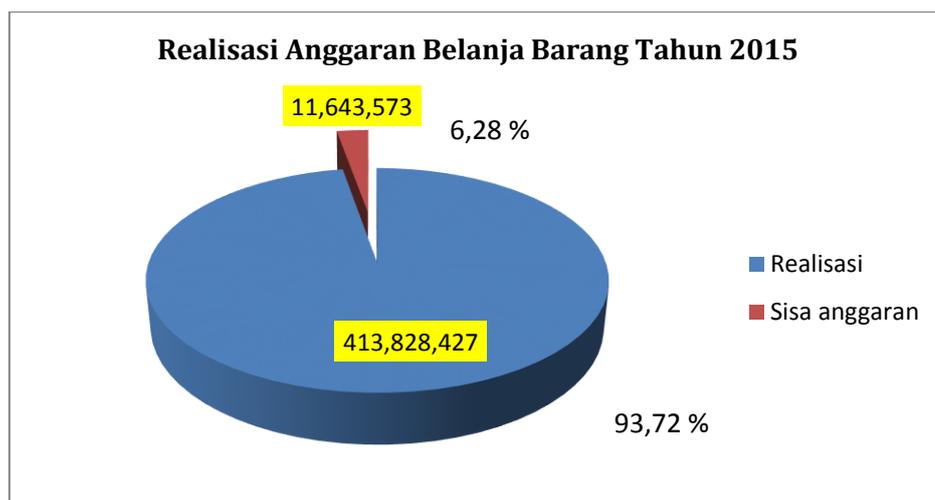
4) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 651.302.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 624.379.155,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 26.922.845,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,75 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,25 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2015 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 425.472.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 413.828.427,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 11.643.573,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,72 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,28 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar **4,03%** dibandingkan dengan tahun 2015. Namun pada tahun 2017, penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar **1,34 %**. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pagu anggaran tahun 2017 yang lebih besar dari tahun 2016 sekitar **19,06 %**. Sedangkan pada tahun 2018 penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar **3,08 %**. Tetapi pada tahun 2019 penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **2,48 %**. Hal ini dipengaruhi oleh adanya sisa anggaran tambahan dari BA.BUN berupa Langganan Internet dan bantuan Rumah Sewa Dinas Hakim yang tidak dapat digeser ke akun lain.

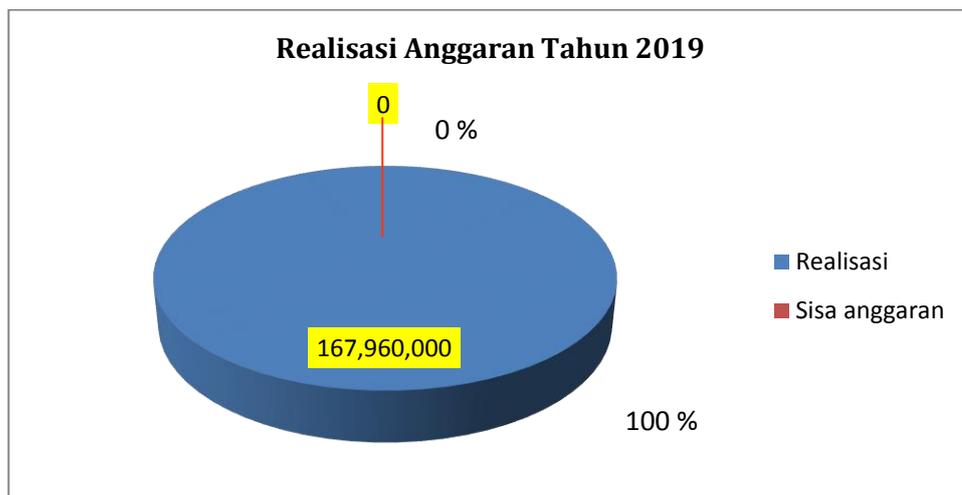
b). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja barang tahun anggaran 2019 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI adalah:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.960.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

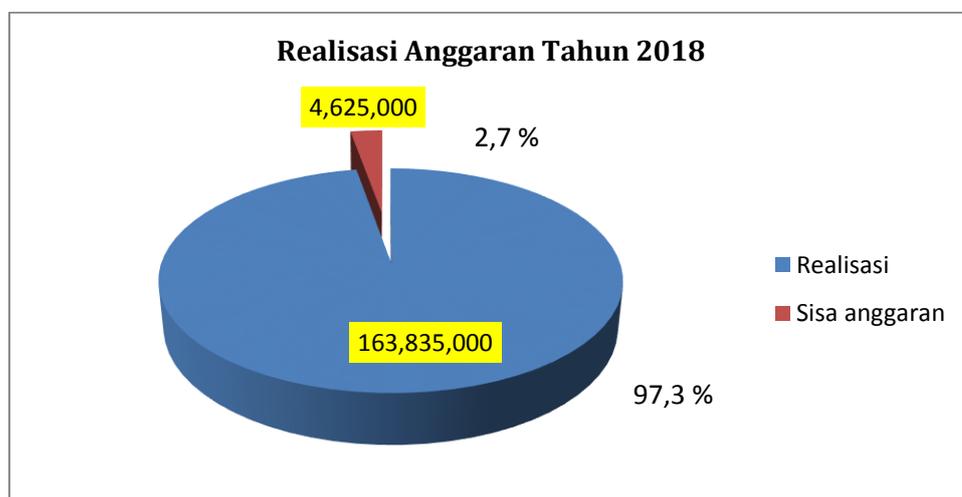
Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja barang antara tahun anggaran 2019 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



- 2) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.460.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 163.835.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 4.625.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,3 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,7 %



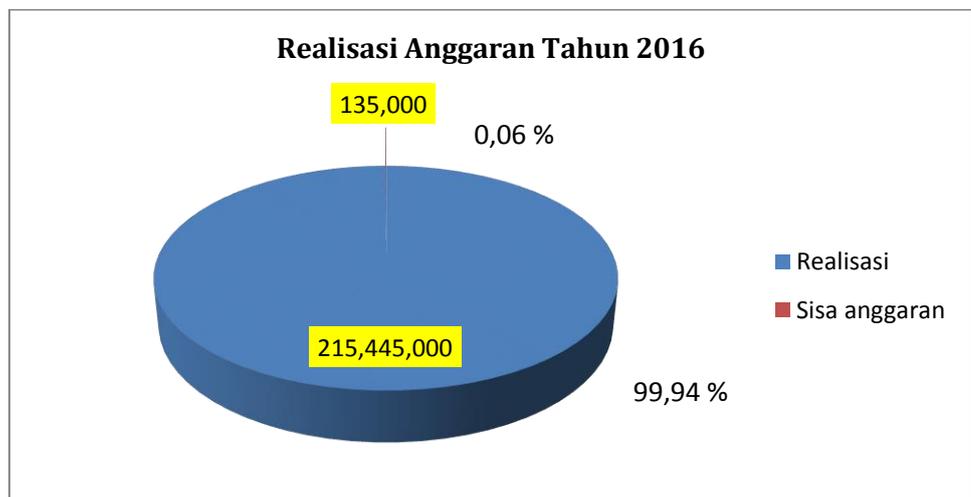
- 3) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 146.660.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



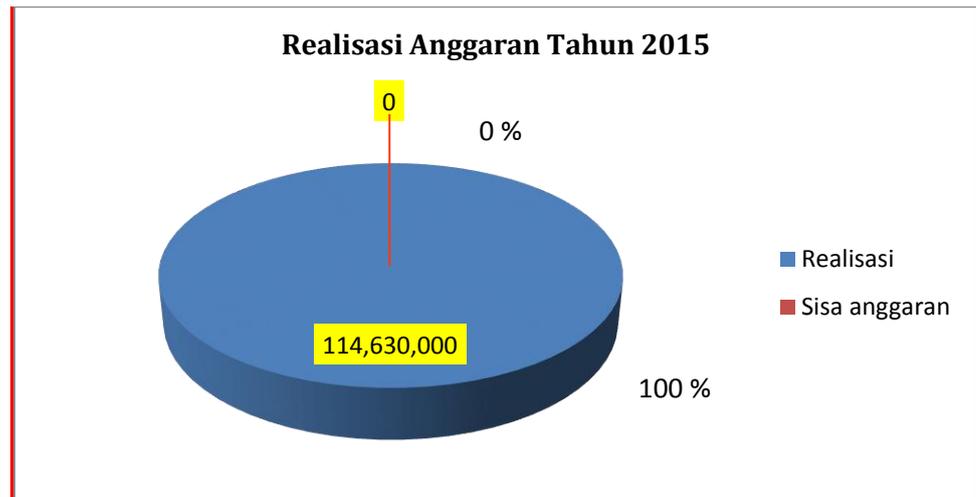
4) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp.215.580.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 215.445.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 135.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %



5) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2015 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp.114.630.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 114.630.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja barang tahun anggaran 2016 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI mengalami penurunan sebesar **0,06%** dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pagu anggaran tahun 2016 yang lebih besar dari tahun 2015 sekitar **88,07 %**. Sedangkan pada tahun 2017, penyerapan anggaran mengalami kenaikan sebesar **0,06 %**. Namun pada tahun 2018, penyerapan anggaran kembali menurun sebesar **2,7 %**. Hal tersebut disebabkan oleh berdasarkan hasil lelang, besar nilai kontrak dengan Penyedia Jasa PosBaKum adalah Rp 65.450.000,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dipergunakan. Sedangkan pada tahun 2019, penyerapan anggaran kembali naik sebesar **2,7 %**.

3. Belanja Modal

Realisasi Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor belanja modal untuk tahun anggaran 2019 adalah :

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 173.000.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

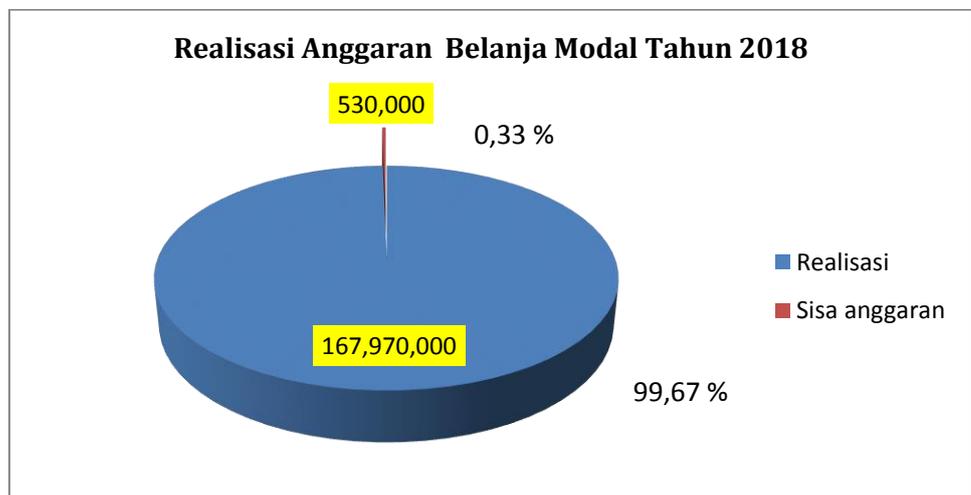
Kalau dibandingkan realisasi kinerja anggaran pada sektor belanja modal antara tahun anggaran 2019 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun 2018, 2017, 2016 dan 2015, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :



b) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2018 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 168.500.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 167.970.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 530.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,67 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,33 %



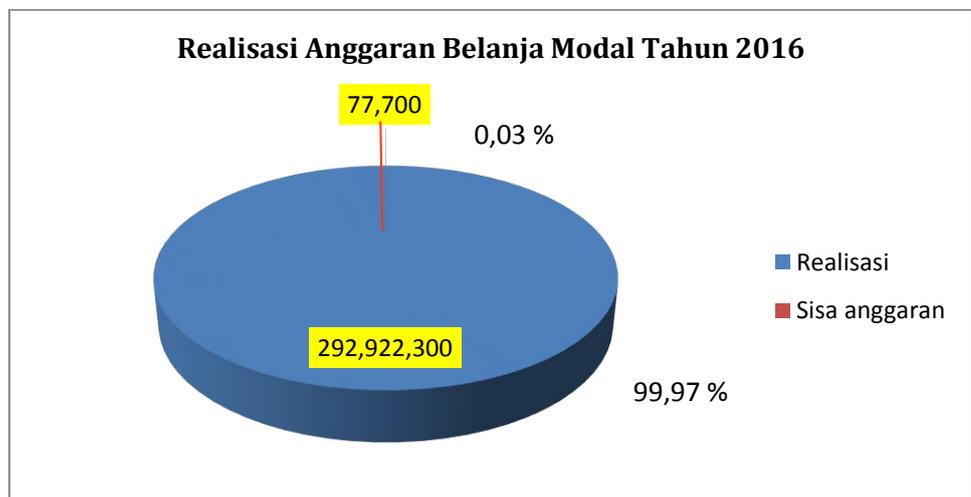
c) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2017 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 225.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 224.877.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 123.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,95 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,05 %



d) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2016 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 293.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 292.922.300,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 77.700,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03 %



e) Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2015 :

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 140.000.000,-
- Realisasi sebesar = Rp. 139.909.000,-
- Sisa anggaran sebesar = Rp. 91.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %



Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja modal tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar **0,03%** dibandingkan dengan tahun 2015. Namun pada tahun 2017, penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar **0,02 %** dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada tahun 2018, penyerapan menurun lagi sebesar **0,32 %**. Tetapi tahun 2019, penyerapan naik sebesar **0,33 %**.